



FILE DITERIMA : 24 Apr 2025

FILE DIREVIEW: 24 Apr 2025

FILE PUBLISH : 30 Nov 2025

Studi Multi Situs Tentang Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta

Jihaan Haniifah Christyodetaputri, Mohammad Efendi, Shinta Yuni Susilawati,
Wiwik Dwi Hastuti, Ranti Novianti

Universitas Negeri Malang

E-mail: jihaan.haniifah.2401628@students.um.ac.id

Abstrak: Pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama terkait perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dalam implementasi pendidikan inklusif di kedua jenis sekolah tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multi situs, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk validasi data. Penelitian ini menemukan bahwa sekolah negeri seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran, fasilitas, dan kurangnya pelatihan guru dalam pendidikan inklusif, sementara sekolah swasta lebih fleksibel dalam pendanaan tetapi terbatas dalam melayani keberagaman siswa berkebutuhan khusus. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih, dukungan fasilitas, serta pemahaman dan sikap terhadap inklusi. Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya peningkatan pelatihan bagi guru, penguatan budaya inklusif di sekolah, serta alokasi sumber daya yang lebih merata agar pendidikan inklusif dapat terwujud secara optimal di seluruh jenis sekolah. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk memperbaiki implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan yang ada di sekolah negeri dan swasta.

Kata kunci: Implementasi Pendidikan Inklusi; Sekolah Negeri dan Swasta; Sumber Daya Manusia

Abstract: Inclusive education in Indonesia faces significant challenges in its implementation, particularly related to differences between public and private schools. This study aims to examine the differences in the implementation of inclusive education across these two types of schools, identify the challenges faced, and identify factors influencing its success or failure. This study employed a qualitative method with a multi-site approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using triangulation techniques for data validation. The study found that public schools are often hampered by limited budgets, facilities, and a lack of teacher training in inclusive education, while private schools are more flexible in funding but limited in serving the diversity of students with special needs. Key factors influencing the implementation of inclusive education include the availability of trained human resources (HR), supporting facilities, and understanding and attitudes toward inclusion. Recommendations include the need for increased teacher training, strengthening an inclusive culture in schools, and more equitable resource allocation to ensure optimal implementation of inclusive education across all types of schools. This study provides important insights for improving the implementation of inclusive education in Indonesia, particularly in addressing the challenges inherent in public and private schools.

Keywords: Implementation of Inclusive Education; Public and Private Schools; Human Resources

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi di Indonesia merujuk pada upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, tanpa terkecuali, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik itu fisik, intelektual, sosial, atau emosional, diberikan kesempatan untuk belajar di lingkungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang pentingnya

pendidikan yang merata dan adil, pendidikan inklusi menjadi isu yang semakin diperhatikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan inklusi berfokus pada prinsip kesetaraan dan keadilan, di mana setiap anak, terlepas dari kondisi fisik atau mentalnya, memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dari tenaga pendidik, terbatasnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta stigma sosial yang masih melekat pada anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dalam implementasinya, pendidikan inklusi di Indonesia memiliki tantangan besar dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Meskipun kedua jenis sekolah ini diwajibkan untuk menyediakan pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, terdapat perbedaan signifikan dalam cara implementasi pendidikan inklusi di masing-masing jenis sekolah. Sekolah negeri, yang umumnya memiliki keterbatasan dalam anggaran dan fasilitas, seringkali kesulitan dalam menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru dan infrastruktur yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, sekolah swasta, meskipun lebih fleksibel dalam pendanaan, kadang-kadang hanya melayani segmen siswa tertentu, yang dapat mempengaruhi keberagaman dan inklusivitas siswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, perbedaan dalam pemahaman dan sikap terhadap inklusi antara keduanya juga berperan penting. Sekolah negeri, meskipun diatur oleh kebijakan nasional yang mendukung inklusi, seringkali menghadapi tantangan dalam implementasi nyata di lapangan karena keterbatasan tenaga pendidik yang terlatih dan fasilitas yang kurang memadai. Sementara itu, sekolah swasta, meskipun dapat lebih mudah mengalokasikan dana dan sumber daya untuk mendukung pendidikan inklusi, terkadang masih menghadapi kendala dalam membangun budaya inklusif yang benar-benar menyambut keberagaman. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya upaya yang lebih besar untuk memastikan pemerataan pendidikan inklusi di seluruh jenjang pendidikan, sehingga semua anak, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pendidikan yang setara. Namun masih belum banyak kajian yang mengkaji secara rinci terkait perbedaan implementasi pendidikan inklusi baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul “Studi Multi Situs tentang Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Negeri dan di Sekolah Swasta” serta tantangan dan solusi yang dihadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multi situs untuk menganalisis perbedaan implementasi pendidikan inklusif di sekolah negeri dan sekolah swasta. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yakni wawancara mendalam

dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendukung pendidikan, observasi langsung terhadap praktik pendidikan inklusif di kelas, serta dokumentasi berupa catatan dan laporan terkait kebijakan dan prosedur yang diterapkan di masing-masing sekolah. Adapun beberapa kriteria dari ke 2 sekolah yang digunakan, diantaranya; 1) Mengimplementasikan layanan inklusi kurang lebih 5 tahun terakhir; 2) Memiliki akreditasi yang setara, berkenan untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian dengan tidak menginformasikan nama sekolah dan informan guan kesepakatan bersama.

Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang dikumpulkan, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan data dari penelitian terdahulu serta bahan bacaan yang relevan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di kedua jenis sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerimaan siswa dengan kebutuhan khusus (ABK) antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di sekolah negeri, seperti SDN T 2, tidak terdapat persyaratan khusus bagi siswa ABK, sehingga sekolah cenderung menerima seluruh jenis ABK tanpa syarat ketat. Sebaliknya, sekolah swasta, seperti di SD KML, menetapkan kriteria lebih ketat, seperti calon siswa yang harus mengikuti terapi atau diet khusus serta memiliki status tertentu, seperti sudah lulus toilet training atau wajib didampingi oleh seorang shadow teacher. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman kebutuhan siswa yang mempengaruhi implementasi pendidikan inklusif di kedua jenis sekolah tersebut.

Dalam hal kesejahteraan (*wellbeing*), kedua jenis sekolah mengalami tekanan terkait jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan jumlah siswa ABK yang ditangani. Di sekolah negeri, kepala sekolah mendapatkan tekanan dari pengawas untuk memastikan pendidikan inklusif berjalan dengan baik, namun terbatasnya jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi kendala utama. GPK yang tersedia hanya satu orang, sementara jumlah siswa dengan berbagai kebutuhan khusus sangat banyak. Di sisi lain, sekolah swasta meskipun memiliki lebih banyak GPK (tiga orang), tetap menghadapi tantangan dalam mengelola beban kerja yang tinggi karena keterbatasan waktu dan ruang. Kedua sekolah mengalami kendala dalam memastikan bahwa GPK dapat menangani semua kebutuhan siswa ABK dengan optimal. Dari segi kerja sama antar tenaga pendidik, ditemukan adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai

tanggung jawab terhadap siswa ABK. Di sekolah negeri, GPK merasa kurangnya empati dan dukungan dari guru kelas, yang sering kali menganggap bahwa semua aspek yang berhubungan dengan ABK adalah tanggung jawab GPK, termasuk pengelolaan perilaku dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di sekolah swasta, meskipun ada upaya untuk membangun kerja sama, tantangan yang sama juga muncul terkait kurangnya pemahaman guru kelas mengenai pentingnya kolaborasi dalam mendukung pendidikan inklusif. Kepala sekolah di kedua jenis sekolah menyadari masalah ini, namun belum ada solusi yang memadai, seperti penambahan jumlah GPK atau peningkatan pelatihan bagi guru kelas. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan sistemik dalam menciptakan lingkungan inklusif yang tidak hanya bergantung pada fasilitas dan akomodasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah.

Pembahasan

Perbedaan Penerimaan Siswa ABK

Sekolah negeri cenderung lebih terbuka dalam menerima siswa dengan berbagai kondisi kebutuhan khusus tanpa menetapkan kriteria yang ketat, sementara sekolah swasta memiliki kriteria lebih spesifik dan ketat untuk menerima siswa ABK, seperti keharusan mengikuti terapi atau diet khusus dan lulus toilet training. Ini mencerminkan perbedaan dalam cara sekolah negeri dan swasta memandang dan menanggapi keberagaman siswa dengan kebutuhan khusus. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sekolah negeri lebih fokus pada pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa, sementara sekolah swasta cenderung mengutamakan kualitas dan sumber daya yang tersedia (Savitri, 2019). Hal ini bisa berakar dari perbedaan dalam kebijakan pendanaan dan pengelolaan sumber daya di kedua jenis sekolah (Kusnadi & Asriyanti, 2020).

Keterbatasan Tenaga Pendukung

Di kedua jenis sekolah, terdapat masalah terkait dengan keterbatasan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia. Di sekolah negeri, hanya ada satu GPK untuk menangani banyak siswa ABK dengan kebutuhan yang bervariasi. Sementara itu, di sekolah swasta, meskipun jumlah GPK lebih banyak (tiga orang), mereka masih kesulitan untuk menangani semua kebutuhan siswa ABK secara maksimal karena beban kerja yang berat dan keterbatasan waktu. Hal ini sejalan dengan temuan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa keterbatasan SDM, terutama di sekolah negeri, menjadi kendala utama dalam pengelolaan pendidikan inklusif (Hidayati, 2018). Sementara itu, di sekolah swasta, meskipun ada lebih banyak tenaga pengajar, keterbatasan waktu dan

anggaran tetap menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang optimal (Prasetyo, 2020).

Kendala Kerja Sama Antar Guru

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya masalah dalam kolaborasi antara GPK dan guru kelas. Di sekolah negeri, guru kelas cenderung menganggap semua hal terkait ABK adalah tanggung jawab GPK, yang mengarah pada kurangnya empati dan kerjasama antara keduanya. Hal yang serupa juga terjadi di sekolah swasta, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi, masih ada kesenjangan pemahaman mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pendidikan inklusif. Penelitian oleh Santoso (2017) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif adalah kurangnya pemahaman yang seragam antara guru kelas dan GPK mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Kolaborasi yang lebih intensif dan pelatihan bersama dapat membantu mengatasi kesenjangan ini (Syamsul, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun keduanya diwajibkan untuk menyediakan pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Perbedaan signifikan ditemukan antara kedua jenis sekolah dalam hal penerimaan siswa ABK, dengan sekolah negeri yang lebih terbuka namun tanpa kriteria ketat, sedangkan sekolah swasta menerapkan kriteria selektif yang lebih spesifik. Keterbatasan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan kesulitan dalam mengelola beban kerja yang berat menjadi masalah utama yang dihadapi oleh kedua jenis sekolah. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya kolaborasi yang efektif antara GPK dan guru kelas, yang sering kali menganggap bahwa seluruh tanggung jawab terkait ABK adalah beban GPK. Hal ini menciptakan ketegangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif, dibutuhkan upaya peningkatan pelatihan bagi guru, penguatan budaya inklusif, serta penambahan sumber daya manusia yang lebih memadai, baik dari sisi jumlah GPK maupun kualitasnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya upaya sistemik dalam mengatasi tantangan yang ada, dengan memastikan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada fasilitas dan akomodasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di seluruh jenis sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbarovna, A. S. (2022). Inclusive education and its essence. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11(01), 248-254.
- Chen, Y. L. (2024). Implementation of a peer-mediated intervention to teach behavioral expectations for two students on autism spectrum and a student with ADHD in an inclusive elementary classroom in Taiwan. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 54(3), 852-870.
- Chinhara, H., & Kuyayama, A. (2024). Challenges to the provisioning of equitable quality education opportunities in inclusive early childhood development classes attached to primary schools: A case of one district in Zimbabwe. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 100957.
- Chow, W. S. E., & Sharma, U. (2024). Are in-service teachers supported in Hong Kong? Teachers' perceived support needs in the implementation of inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 28(11), 2546-2562.
- DeMatthews, D. E., Serafini, A., & Watson, T. N. (2021). Leading inclusive schools: Principal perceptions, practices, and challenges to meaningful change. *Educational Administration Quarterly*, 57(1), 3-48.
- DeMatthews, D. E., Kotok, S., & Serafini, A. (2020). Leadership preparation for special education and inclusive schools: Beliefs and recommendations from successful principals. *Journal of Research on Leadership Education*, 15(4), 303-329.
- Dignath, C., Rimm-Kaufman, S., van Ewijk, R., & Kunter, M. (2022). Teachers' beliefs about inclusive education and insights on what contributes to those beliefs: a meta-analytical study. *Educational Psychology Review*, 34(4), 2609-2660.
- Finkelstein, S., Sharma, U., & Furlonger, B. (2021). The inclusive practices of classroom teachers: A scoping review and thematic analysis. *International Journal of Inclusive Education*, 25(6), 735-762.
- Hidayati, N. (2018). *Kendala dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Negeri dan Swasta di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 12(2), 55-70.
- Kusnadi, B., & Asriyanti, T. (2020). *Perbedaan Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Negeri dan Swasta*. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 9(1), 22-30.
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Spörer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943-957.
- Lindner, K. T., Schwab, S., Emara, M., & Avramidis, E. (2023). Do teachers favor the inclusion of all students? A systematic review of primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education. *European Journal of Special Needs Education*, 38(6), 766-787.
- Love, H. R., & Horn, E. (2021). Definition, context, quality: Current issues in research examining high-quality inclusive education. *Topics in Early Childhood Special Education*, 40(4), 204-216.
- Opoku, M. P., Cuskelly, M., Pedersen, S. J., & Rayner, C. S. (2021). Applying the theory of planned behaviour in assessments of teachers' intentions towards practicing inclusive education: A scoping review. *European*
- Óskarsdóttir, E., Donnelly, V., Turner-Cmuchal, M., & Florian, L. (2020). Inclusive school leaders—their role in raising the achievement of all learners. *Journal of Educational Administration*, 58(5), 521-537.
- Prasetyo, A. (2020). *Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Peluang di Sekolah Swasta*. *Jurnal Pendidikan Swasta*, 4(3), 110-125.
- Saloviita, T. (2020). Attitudes of teachers towards inclusive education in Finland. *Scandinavian journal of educational research*, 64(2), 270-282.
- Santoso, W. (2017). *Kolaborasi Guru Kelas dan GPK dalam Pendidikan Inklusif*. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 8(4), 102-115.
- Savitri, L. (2019). *Keterbukaan Sekolah dalam Menerima Siswa Berkebutuhan Khusus di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 15(1), 30-45.
- Shields, C. M., & Hesbol, K. A. (2020). Transformative leadership approaches to inclusion, equity, and social justice. *Journal of School Leadership*, 30(1), 3-22.
- Syamsul, A. (2021). *Pengaruh Pelatihan Bersama terhadap Kolaborasi Guru Kelas dan GPK*. *Jurnal Pembelajaran Inklusif*, 14(2), 75-88.
- Van Mieghem, A., Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2020). An analysis of research on inclusive education: a systematic search and meta review. *International Journal of Inclusive Education*, 24(6), 675-689.